

SKW



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD KABUPATEN NGADA
TERHADAP PENGANTAR NOTA KEUANGAN ATAS RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2026**

- ❖ Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
- ❖ Salam Sejahtera bagi kita semua,
- ❖ Om Swastiastu,
- ❖ Namo Budaya,
- ❖ Salam Kebajikan.
- ❖ Yth. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada,
- ❖ Yth. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Ngada beserta seluruh jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada,
- ❖ Serta hadirin yang berbahagia.
- ❖ Salam Indonesia Raya!!!

Pada tempat yang pertama, marilah kita menyampaikan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat pemeliharaan dan berkat perlindunganNya terhadap kita sekalian, sehingga dapat hadir dan melaksanakan rapat paripurna ini.

Dan sebelum menyampaikan Pemandangan umum atas Nota Keuangan tentang APBD Ngada 2026, Fraksi Partai Gerindra pada kesempatan ini, ingin menyampaikan SELAMAT BERJUANG DAN BERTANDING bagi PSN NGADA dan PS CITRA BAKTI NGADA dalam Turnamen Bergengsi El Tari Memorial Cup (ETMC) di Kabupaten Ende dalam beberapa minggu ke depan.

Hadirin sidang Dewan yang terhormat,

Pada tempat yang kedua, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi kepada Pemeritah yang telah menyampaikan **PENGANTAR NOTA KEUANGAN ATAS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2026**. Fraksi memandang perlu penyampain **RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH** tersebut, sebagai penerapan asas transparansi dan *akuntabel* pengelolaan keuangan daerah, dalam membiayai penyelenggaraan program Permerintah Daerah Kabupaten Ngada selama Tahun Anggaran 2026 yang terangkum dalam Panca Cita Kepala Daerah untuk mewujudkan Ngada yang unggul, mandiri dan berbudaya berbasis pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan sumber daya alam berkelanjutan dengan *Brand Murni Kasih* dalam bingkai **Membangun Desa-Menata Kota**.

Fraksi Partai Gerindra menyadari bahwa Nota Keuangan datas Rancangan APBD Kabupaten Ngada TA 2026 yang didahului dengan KUA dan PPAS sebagai pedoman penyusunannya akan terinci dalam rincian APBD Kabupaten Ngada TA 2026 yang akan dibahas pada masa sidang ini.

Fraksi Partai Gerindra juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah melaksanakan program kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 dan mendapat respon baik dari masyarakat terutama penyebaran program dokumen perencanaan melalui program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, hajatan budaya, insentif RT, TPP PNS, Traktor, *handtrancto*, Fiber dan alat semprot, bibit Kelapa Genja untuk petani, perahu dan fasilitas tangkap untuk nelayan, sarana dan kegiatan olahraga, kolaborasi dengan lembaga keagamaan, beasiswa PIP versi daerah bagi anak SD dan SMP, pakaian seragam, kuliah gratis yang diupayakan oleh pemerintah untuk 152 anak Ngada di ITS Mandala Jember yang tidak teranggarkan melalui APBD juga fasilitasi beasiswa magang ke Jepang sebanyak 50 anak yang sekarang sedang mengikuti persiapan dan pelatihan di STIKOM Bali.

Fraksi menyadari masih banyak program yang belum terselesaikan yang harus dilanjutkan dalam tahun APBD 2026 ini. Karena itu, melalui pemandangan umum ini, Fraksi Partai Gerindra akan menyampaikan beberapa catatan kritis, pertanyaan klarifikasi, koreksi dan masukan terhadap Nota Keuangan tentang **RANCANGAN**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2026:

1) PENDAPATAN DAERAH.

Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp. 880.909.960.122 (*Delapan ratus delapan puluh milyar Sembilan ratus sembilan juta Sembilan ratus enam puluh ribu seratus dua puluh dua ribu rupiah*).

Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 61.000.000.000
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 810.197.152.266,- yang terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 1.733.710.000; Dana Transfer Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) sebesar Rp. 519.606.679.000; Dana Transfer Umum yang Telah Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) sebesar Rp. 14.467.440.000; Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) sebesar Rp. 953.329.000; Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK- Non Fisik) sebesar Rp. 138.238.725.000; Dana Desa sebesar Rp. 124.026.184.000 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 11.171.085.266.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 9.712.807.856,- yang bersumber dari Pendapatan Dana JKN Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Sejalan dengan dokumen perencanaan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ngada tahun 2025-2029, untuk target pendapatan daerah khusus PAD sebesar Rp. 67 miliar lebih. Namun target dalam nota keuangan APBD 2026 sebesar Rp. 61 miliar lebih yang terurai sbb: Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 20.272.115.067,- Penerimaan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 32.491.201.500,- Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.084.889.240,- dan penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 6.151.794.193,- Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan Pemerintah mengenai perbedaan asumsi PAD tersebut.

Fraksi juga meminta penjelasan Pemerintah tentang selisih pendapatan sumber dana APBD TA 2025 dengan rancangan APBD TA 2026 dari sisi sumber dana *Block*

grand, Specific grand dan sumber dana lainnya sehingga asumsi belanja dapat direncanakan secara baik sesuai kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra mohon agar pendapatan daerah khusus dari PAD perlu ditingkatkan. Karena itu Fraksi mengusulkan kembali:

- Pemerintah perlu meninjau kembali objek pajak dan besaran tarif harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Banyak substansi retribusi tidak disesuaikan dengan struktur klasifikasi dan kodifikasi objek retribusi menurut Permendagri nomo 84 Tahun 2022.
- Pemerintah Daerah perlu segera memperbaiki basis data wajib pajak dan retribusi secara terintegrasi, sehingga potensi kebocoran dan ketidaktepatan pemungutan dapat diminimalisir.
- Perbaiki manajerial, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapabilitas ASN dan perangkat pemungut PAD. Fraksi Partai Gerindra menyarankan agar perlu ada *reward dan punishment* diterapkan kepada OPD pemungut PAD berdasarkan kinerja riil.
- Mengintegrasikan perubahan Ranperda ini dengan sistem digital pemungutan (e-retribusi dan e-tax)

2) **BELANJA DAERAH**

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.889.773.710.271, dengan rincian:

1. Belanja Operasi, sebesar Rp. 682.073.173.649,- Yang diperuntukkan bagi;
 - Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan ASN, KDH dan Wakil KDH, DPRD, Gaji dan Tunjangan PPPK, Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai, iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN, KDH dan DPRD serta PPPK) sebesar Rp.500.298.557.274,55. Alokasi anggaran belanja pegawai telah memperhitungkan acress gaji sebesar 2%.
 - Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp.178.290.389.574,45.

- Belanja Hibah (Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Masyarakat, Kelompok Keagamaan) sebesar Rp. 3.359.226.800,-
 - Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 125.000.000,-
2. Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya) direncanakan sebesar Rp. 17.439.352.622.
 3. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,-
 4. Belanja Transfer, direncanakan sebesar Rp. 185.761.184.000,- terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2026 dianggarkan sebesar 1.000.000.000,- dan Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa tahun 2026 sebesar Rp. 184.761.184.000,- yang terdiri atas belanja bantuan keuangan umum sebesar Rp. 124.026.184.000,- dan belanja bantuan keuangan khusus ke desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 60.735.000.000,-.

Fraksi Partai Gerindra sependapat dengan Pemerintah berkaitan dengan Belanja Daerah sebesar Rp. 889.773.710.271. Namun fraksi ingin mendapat penjelasan yang lebih mendalam mengenai belanja Pegawai sebesar Rp. 500.298.557.274,55 yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan APBD perubahan TA 2025 sebesar Rp. 464.622.620.782,85 (*empat ratus enam puluh empat miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rooiah delapan puluh lima sen*). Apakah dalam perencanaan belanja ini hanya untuk alokasi gaji dan tunjangan ASN, KDH dan Wakil KDH, DPRD, Gaji dan Tunjangan PPPK, Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru, Tambahan Penghasilan Pegawai, iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN, KDH dan DPRD serta PPPK semata atau sudah dialokasikan juga honor bagi PPPK paruh waktu, pegawai-pegawai honor di semua dinas, Guru bosdik di sekolah swasta dan guru yang sudah masuk data base bosdik? Fraksi sangat berharap agar Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesejahteraan pegawai honor, paruh waktu dan guru bosdik dan guru-guru yang mengajar di sekolah swasta.

Karena itu, Fraksi mengusulkan penambahan anggaran untuk belanja pegawai kalau sekiranya belum terakomodirnya pegawai paruh waktu, honorer dan guru bosdik dan guru di sekolah swasta dengan skema pembiayaan disesuaikan dengan regulasi yang ada.

Fraksi Partai Gerindra juga meminta penjelasan Pemerintah tentang rincian belanja modal untuk masing-masing item (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya) dari yang direncanakan sebesar Rp. 17.439.352.622.

3) PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun 2026 terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan digunakan dalam rangka menutup defisit anggaran yang pada Rancangan APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 8.863.750.149,- Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.8.863.750.149. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada Rancangan APBD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 0,00

Berkaitan dengan pembiayaan daerah, Fraksi partai Gerindra mempertanyakan kepada Pemerintah tentang penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 8. 863.750.149 jika dibandingkan dengan APBD TA 2025 sebesar 22 miliar lebih ternyata sesuai nota keuangan perubahan APBD 2025 sebesar 79 miliar lebih. Fraksi mengusulkan agar pembiayaan daerah ditingkatkan menjadi 15 miliar lebih setelah dipertimbangkan sisa belanja TA 2025 tersebut.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, pada tahun anggaran 2026, besaran alokasinya menurun sangat signifikan. Adanya kebijakan-kebijakan seperti ini tentu berdampak pada kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang proporsional pada setiap perangkat daerah. Karena itu, fraksi menegaskan beberapa hal ini sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan, antara lain:

- Melakukan kajian ulang dan rasionalisasi terhadap target PAD 2026 agar lebih ambisius selaras dengan RPJMD.
- Belanja daerah harus produktif dan menciptakan efek berganda sebagaimana dinyatakan dalam RPJDPD Kabupaten Ngada bab V "Arah kebijakan transformasi daerah menuju perekonomian yang inklusif, berdaya saing dan berkeadilan".
- Melakukan reorientasi APBD menuju program produktif berdaya saing.
- Menetapkan indikator kinerja berbasis outcome bukan sekedar serapan anggaran. Menjalankan kebijakan fiskal untuk kemandirian pangan, energi dan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.
- Dan sesuai amanat Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, fraksi sangat mengharapkan agar Pemerintah tetap menaruh skala prioritas untuk:
 1. Penataan Lampu jalan dalam kota untuk mewujudkan Bajawa terang.
 2. Mewujudkan Bajawa sebagai kota bunga.
 3. Menyediakan *Cold storage* dan memperbanyak *freezer* di beberapa Kecamatan dan di kota Bajawa untuk menyegarkan ikan dan daging demi memenuhi permintaan dapur makan bergizi gratis.
 4. Berkaitan MBG perlu ditingkatkan sektor peternakan dan peternakan untuk memenuhi penyediaan bahan baku lokal seperti sayuran, pisang Calvands, ayam boiler dan ayam petelur.
 5. Pemekaran Kecamatan dan Desa untuk Kecamatan Bajawa, Riung, Lengkosambi dll untuk mempercepat kemajuan.
 6. Memperhatikan manajemen Rumah Sakit Daerah yang pembiayaannya diserahkan sepenuhnya pada Pendapatan Blud, mohon kiranya Pemerintah mempertimbangkan dukungan pembiayaan agar tidak berdampak pada pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
 7. Memperhatikan infrastruktur jalan Tenilopiyo-Aimere, Peningkatan jalan sebowuli-Waepara-Ruto, Peningkatan jalan Malapali, Peningkatan jalan tani Nua olo Foa ke Nitu Niba, renovasi gedung SMP Satap Ngusumana Bajawa Utara, penambahan ruang kelas SD Gela Roja kecamatan Inerie, jaringan air bersih untuk masyarakat desa Kila, aimere, tembok penyangkang pada

lapangan Paroki Jerebuu, tembok penyokong lapangan Bola kaki Sebowuli, peningkatan jalan Watu-Leke-Paupaga, pembangunan Saluran irigasi MaaMbawa desa Uluwae, peningkatan jalan tani Kajumbawa Desa Uluwae, PLP kampung Ngusu, peningkatan jalan tani Desa Perawea-Maladhawi, jalan desa Renggowelo, kampong Kedha desa Waewea, peningkatan jalan artenatif Rewupoko-Rewu Limbu, peningkatan jalan menuju Puskesmas Uluwae raya dan Puskesmas Boba Soka, peningkatan jalan dizi Gedha-Bunga Nusa, Bajawa-Beiwali-Mukufoka, peningkatan jalan Bethowaso-Ekoheto, peningkatan jalan Lekosoro-Waebetu, perbaikan jalan Kundur Kolong-Marunggela, peningkatan jalan Ngoton-Namut, peningkatan jalan Wate-Ria, peningkatan jalan Teong-waernembung-Rio, pembukaan jalan baru Wue-Namut, peningkatan jalan Rawang Kalo- Rawuk, peningkatan jalan tani di desa Malanuza 1, pembangunan TPT di SMP Derugawe, peningkatan jalan Ngaba Kana desa Malanuza.

8. Fraksi juga menyarankan Pemerintah agar menyediakan biaya untuk pemeliharaan pada beberapa rua jalan dan jembatan serta pembangunan jalan tani dan irigasi dengan pola swakelola mempertimbangkan keterbatasan anggaran.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum mengakhiri Pemandangan umum ini, perlu Fraksi Partai Gerindra menanggapi rumor yang berkembang dimedia sosial mengenai tidak ditandatangani KUA PPAS beberapa waktu lalu. Fraksi menegaskan bahwa tidak ditandatangani KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 itu, bukan sikap Fraksi Partai Gerindra melainkan sikap personal sebagai wakil ketua DPRD yang kebetulan berasal dari Partai Gerindra. Fraksi memandang hal ini sebagai dinamika dalam membangun dan memperkaya diskusi untuk membangun Ngada. Jika memang kejadian ini mengundang polemik dan interpretasi yang negative, Fraksi memohon maaf kepada masyarakat Ngada, kepada Pemerintah dan kepada Lembaga Dewan yang terhormat ini.

Akhirnya secara keseluruhan Fraksi Partai Gerindra dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa menyatakan **MENERIMA ATAS RANCANGAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2026** untuk dibahas dalam masa sidang ini.

Demikianlah pemandangan umum dari Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan pada masa sidang ini dan atas perhatian disampaikan ucapan terima kasih.

Bajawa, 13 November 2026

FRAKSI PARTAI GERINDRA

KETUA



WILHELMUS PETRUS BATE, SH

WAKIL KETUA

ATANASIUS YOS LENGU

SEKRETARIS

KAROLUS BARTOLOMEUS MAKU

ANGGOTA:

RUDOLF AQROZ WOGO, S.Pi



MARTINUS TOIYO